



UNIVERSITAS JAYABAYA FAKULTAS HUKUM

KAMI BANGGA MENJADI MILIK BANGSA

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
T E N T A N G
PENUGASAN MENGAJAR DOSEN TETAP YAYASAN JAYABAYA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA,

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 585 Tahun 1989, dan dalam rangka melaksanakan Proses Pembelajaran agar berdayaguna, berhasilguna dan berkesinambungan, maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Yayasan mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;

Mengingat : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan Universitas Dan Akademi Akademi Jayabaya;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 584 Tahun 1989 Tentang Peraturan Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Sistem Kredit Semester Pada Universitas Dan Akademi Akademi Jayabaya;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kurikulum Operasional Program Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
9. Kalender Akademik Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Jayabaya;

Memperhatikan : Saran Dan Pendapat Unsur Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Tentang Penugasan Mengajar Dosen Tetap Yayasan Jayabaya Program Studi Ilmu Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 yang nama-namanya sebagaimana disebut di dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Mewajibkan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, menyerahkan, menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan melaksanakan kewajiban mengajar dengan penuh tanggung-jawab dan profesional, sesuai dengan jadwal kuliah yang telah disediakan, sebagai upaya menyiapkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;

- Ketiga : Selain kewajiban tersebut di atas, kewajiban lain dan tugas tugas Dosen Tetap Yayasan Jayabaya diatur sebagai berikut:
1. Menyusun rencana perkuliahan untuk 14 (empat belas) kali pertemuan atas dasar RPS yang sudah diserahkan melalui *email* kepada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya sebelum perkuliahan dilaksanakan ;
 2. Mengisi *softcopy* Berita Acara Perkuliahan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya;
 3. Bertugas memberi pengajaran sesuai dengan Rencana Pengajaran Semester (RPS);
 4. Memberi Tes, Quis atau Tugas Mandiri atau Tugas Kelompok kepada para Mahasiswa peserta masing-masing matakuliah;
 5. Menyusun dan menyampaikan melalui *email* Naskah UAS, dan Naskah UAS Cadangan (untuk Mahasiswa ujian susulan, selambat-lambatnya 3 (tiga hari) sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester, ditujukan kepada Wakil Dekan I; Mengevaluasi kemampuan Mahasiswa dalam matakuliah masing-masing yang unsur/komponennya meliputi: Hadir kuliah, Tugas Tengah Semester, Ujian Tengah Semester (UTS), Tugas Akhir Semester dan Ujian Akhir Semester (UAS);
- Keempat : Bertanggungjawab melaksanakan tugas sampai Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Kelima : Kepada yang bersangkutan, diberi imbalan sesuai dengan ketentuan untuk itu;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan, dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Hari : Senin,
: 4 Maret 2024



Dr. T. S. Yanuar Chandra, S.H., M.Hum
NIDN. 0312016601

Tembusan :

1. Yth. Rektor Univ.Jayabaya;
 2. Yth. Ibu Wakil Rektor I, Bapak Wakil Rektor II Univ.Jayabaya;
- A r s i p,-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
T E N T A N G
PENUGASAN MENGAJAR DOSEN TETAP YAYASAN JAYABAYA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/20234**

NO	NAMA DOSEN	MATAKULIAH	SKS	SMT	KELAS
1.	Prof. Dr. Flora Elvistia Firdaus, M.Si	Bahasa Indonesia Hukum	2	II	2
2.	Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H. M.H	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana	4 3	II VI	1 1
3.	Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H	1. Tehnik Perundang-undangan 2. Hukum Konstitusi	2 2	VI VI	2 1
4.	Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., SpN	1. Tehnik Pembuatan Kontrak 2. Pendaftaran Tanah	2 2	VI VI	1 1
5.	Dr. Salmon Ginting, S.H., M.H	Hukum Acara Perdata	3	VI	3
6.	Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H	1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 2. Hk.Peng.Fils. & Logika 3. Hukum Agraria	2 2 2	VIII VI IV	3 1 1
7.	Dr. Nursya Aisyah, S.H., M.H	1. P.P.G.T.P 2. Sosiologi Hukum 3. Cyber Crime	2 2 2	IV VIII VIII	3 2 2
8.	Dr. Kristiawanto, S.H.I, M.H	Metode Penelitian Hukum	2	VI	2
9.	Dr. Achmad Fitriani, S.H., M.H	Pancasila	2	II	1
10.	Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H	1. Hukum dan HAM 2. Ilmu Negara 3. Pengantar Hukum Indonesia	2 2 4	IV II II	2 2 1
11.	Dr. dr. Rudy Sapoelete, Akp., S.H., M.H., MBA	1. Ilmu Kedokteran Forensik 2. Rekam Medis dan PersetujuanTindakan Medis 3. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan dan Hak Pasien	2 2 2	VI VI VIII	2 2 2
12.	Dr. Santrawan Paparang, S.H., M.H., MKn	E-commerce	2	VIII	2
13.	Dr. Yuhelson, S.H., M.H	Tehnik Pembuatan Kontrak	2	VI	1
14.	Dr. Mohamad Ismed, S.H., M.H	1. Tindak Pidana Dalam KUHP 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2 2	VI VIII	2 2
15.	Dr. Basuki, S.H., M.H	Viktimologi	2	VIII	1
16.	Dr. Maryano, S.H., M.H	Hukum Kekuasaan Kehakiman	2	IV	1
17.	Dr. Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag	1. Hukum Hak Kekayaan Waris 2. Hukum Pembuktian	2 2	IV VI	2 1
18.	Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum	1. Hukum Pidana Militer 2. Hukum Pers	2 2	IV VIII	3 2
19.	Dra. Anizar Abdurrachman, M.Si	Pengantar Antropologi	2	I	1

NO	NAMA DOSEN	MATAKULIAH	SKS	SMT	KELAS
20.	Drs. Hazim A. Umar, M.M	Pendidikan Agama	2	II	3
21.	Agnes Manuhutu, S.H, M.H	1. Hukum Anti Monopoli 2. Hukum Kepailitan	2 2	VI VI	1 2
22.	Arie Pudjiastuti, S.H., M.H., SpN	1. Hukum Dagang 2. Hukum Perusahaan 3. Pengantar Ilmu Hukum	3 2 4	IV VIII I	3 1 1
23	Hj. Harimurti, S.H., M.H	1. Hukum Perbankan & Surat Berharga 2. Hukum Perdata Internasional	2 2	VI VI	2 2
24.	Hj. Surya Aswary, S.H., SpN	1. Hukum Perdata 2. Hukum Agraria 3. Perjanjian Kredit & Jaminan	4 2 2	II IV IV	2 2 1
25.	Yuliasara Isnaeni, S.H., M.H	1. Hukum Perdata 2. Hukum Kekayaan & Waris	4 2	II IV	1 1
26.	Harwita Sari, S.H., M.A (<i>In Law</i>)	1. Hukum Laut 2. Hukum Ekstradisi	2 2	IV VI	2 1
27.	Hj. Sheha. A. Habib, S.H., M.H	1. Hukum Acara Pidana 2. Litigasi 3. Hukum Pidana	3 2 4	VI VI II	1 1 1
28.	Hermansyah, S.H., S.E., M.M	Pancasila	2	II	2
29.	Herlinda, S.E., M.M	1. Pengantar Ilmu Ekonomi 2. Dasar – Dasar Manajemen	2 2	II I	1 1
30.	Hendra Dinatha, S.H., M.H	Hukum Organisasi Internasional	2	VI	2
31.	Ir. Ricky Hartonio, M.M	Pengantar Sosiologi	2	II	3
32.	Nur lian, S.H., M.H	1. Kewarganegaraan 2. Hukum Administrasi Negara 3. Ilmu Negara	2 3 2	I IV II	1 3 2
33.	Masneldy, S.E., M.M	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	II	2
34.	Zulkifli, S.H., M.H	1. Hukum Asuransi 2. Hukum Ketenagakerjaan	2 2	IV IV	1 1
35.	Yeni Novitasari, S.H., M.H	Hukum Perjanjian Internasional	2	VII	2
36.	Citasari Jayaputri SH., MKn	Hukum Agraria	2	IV	2

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Hari : Senin,
 Tanggal : 4 Maret 2024

 Dr. Fokk Yanuar Chandra, S.H., M.Hum
 NIDN. 0312016601

UNIVERSITAS JAYABAYA
BERITAS ACARA PERKULIAHAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
FAKULTAS HUKUM (JENJANG S1)

Nama Dosen: Harwita Sari, S.H, M.A (in law)

NIDN: 0310116609

Matakuliah: HUKUM EKSTRADISI

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
1	Rabu Jam 09.40-10.20	PENDAHULUAN <ul style="list-style-type: none"> ● Pengenalan Mata Kuliah Hukum Ekstradisi dan Kontrak Perkuliahan ● Penjelasan literatur yang digunakan ● Penjelasan Silabus Hukum Ekstradisi ● Arti Pentingnya Mahasiswa mengetahui tentang Ekstradisi 	1	1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990 2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 <u>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :</u> 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ektradisi 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina	\\Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
				4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi	
2	Rabu Jam 09.40-10.20	<p>LANJUTAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengertian ekstradisi ● Ekstradisi menurut UU No.1/1979; ● Obyek dan ruang lingkup ekstradisi ● Fungsi tujuan Ekstradisi; ● Unsur-unsur Ekstradisi 	2	<p>1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990</p> <p>2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980</p> <p>3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981</p> <p>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :</p> <p>1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi</p> <p>2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ektradisi</p> <p>3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina</p> <p>4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi</p>	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan
3	Rabu Jam 09.40-10.20	<p>TINDAKAN-TINDAKAN SELAIN EKSTRADISI</p> <p>A. Persona non Grata</p> <p>B. Deportasi</p>	3	1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
				<p>2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980</p> <p>3. M. Budiarto, Ektradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981</p> <p>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :</p> <p>1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ektradisi</p> <p>2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ektradisi</p> <p>3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ektradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina</p> <p>4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi</p>	
4	Rabu Jam 09.40-10.20	<p>SUMBER HUKUM FORMAL EKSTRADISI</p> <p>a. Yang bersumber dari Hukum Internasional</p> <p>b. Yang berkaitan dengan Hukum Nasional</p> <p>c. Ektradisi sebagai hokum kebiasaan Internasional</p>	4	<p>1. I Wayan Parthiana, Ektradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990</p> <p>2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980</p> <p>3. M. Budiarto, Ektradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981</p> <p>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :</p>	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
				1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi	
5	Rabu Jam 09.40-10.20	ASAS-ASAS EKSTRADISI a. Asas double criminalitas (kejahatan ganda) <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Sistim daftar - Sstim tanpa daftar - Sistim kombinasi b. Asas kekhususan <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Ruang lingkup 	5	1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990 2. M. Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
				<p>antara Pemerintah RI dan Republik Philipina</p> <p>4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi</p>	
6	<p>Rabu</p> <p>Jam 09.40-10.20</p>	<p>LANJUTAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Asas nebis in idem <ul style="list-style-type: none"> - pengertian ● Asas daluarsa <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Hukum negara mana yang berlaku - Pengecualian 	6	<p>1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990</p> <p>2. M. Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980</p> <p>3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981</p> <p><u>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :</u></p> <p>1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi</p> <p>2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi</p> <p>3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina</p> <p>4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi</p>	<p>Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan</p>
7	<p>Rabu</p> <p>Jam 09.40-10.20</p>	<p>LANJUTAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Asas tidak menyerahkan warga negara sendiri <ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang ● Asas tidak mengekstradisi kejahatan politik 	7	<p>1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990</p>	

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian kejahatan politik - Latar belakang pengecualian 		<p>2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980</p> <p>3. M. Budiarto, Ektradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981</p> <p>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ektradisi 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ektradisi 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ektradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi 	
8	Rabu Jam 09.40-10.20	Ujian Tengah Semester	8		
9	Rabu Jam 09.40-10.20	<p>EKSTRADISI DAN KEJAHATAN YANG DIANCAM HUKUMAN MATI</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pro dan kontra hukuman mati b. Pengaturan dalam perjanjian ektradisi c. Dilema kejahatan yang diancam hukuman mati dalam teori dan praktek ektradisi 	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Wayan Parthiana, Ektradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990 2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
				<p>3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981</p> <p><u>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi 	
10	Rabu Jam 09.40-10.20	<p>EKTRADISI DALAM BERBAGAI PERATURAN DALAM LINGKUP NASIONAL,</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi <ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup - Asas-asas ekstradisi menurut UU no 1 tahun 1979 ● 	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990 2. M. Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 <p><u>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara 	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
				Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ektradisi 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi	
11	Rabu Jam 09.40-10.20	LANJUTAN ● Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi <ul style="list-style-type: none"> - Kejahatan dengan hukuman mati menurut UU no 1 tahun 1979 - Syarat-syarat Ekstradisi - Kejahatan-kejahatan yang bias diekstradisi 	11	1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990 2. M. Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ektradisi 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan


No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
12	Rabu Jam 09.40-10.20	<p>PROSEDUR PERMINTAAN EKSTRADISI</p> <p>a. Prosedur pengajuan ekstradisi oleh negara peminta kepada pemerintah Indonesia</p> <p>b. Prosedur pengajuan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia kepada negara lain</p>	12	<p>1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990</p> <p>2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980</p> <p>3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981</p> <p>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :</p> <p>1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi</p> <p>2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ektradisi</p> <p>3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina</p> <p>4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi</p>	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan
13	Rabu Jam 09.40-10.20	<p>EKSTRADISI DALAM BERBAGAI PERATURAN DALAM LINGKUP BILATERAL</p> <p>a. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ektradisi</p>	13	<p>1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990</p> <p>2. M. Budiarto, Masalah Ektradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980</p>	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
		b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina c. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi		3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi	
14	Rabu Jam 09.40-10.20	LANJUTAN <ul style="list-style-type: none"> ● Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ekstradisi ● Perjanjian-perjanjian bilateral terbaru 	14	1. I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990 2. M. Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 3. M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi	Materi Ajar PPT Dibagikan setiap Perkuliahan

No	Hari / Tgl/ jam	Materi		Daftar Buku	Keterangan
				2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia mengenai Ektradisi 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian ektradisi antara Pemerintah RI dan Republik Philipina 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang ektradisi	
15	Rabu Jam 09.40-10.20	PRESENTASI TUGAS	15		<i>Dari Tugas Essay masing masing Mahasiswa</i>

Mengetahui

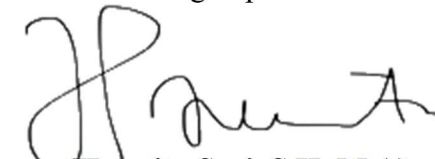
Dekan



(Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., M.Hum)

Jakarta , 2024

Dosen Pengampu



(Harwita Sari, S.H., M.A)



DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER GENAP 2023/2024

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM S1
MATAKULIAH : HN56152 HUKUM EKSTRADISI
KELAS : 05
PESERTA : 5
DOSEN : Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H.
HARWITA SARI, SH, MA (in law)

Hal : 1 / 1.

No	N I M	NAMA MAHASISWA	KOMPONEN NILAI ANGKA				NILAI AKHIR	
			HADIR 10%	TUGAS 20%	UTS 30%	UAS 40%	ANGKA 100%	HURUF
1	2021330050068	BILLY ANGGI YUARI BAKAR	16	0	0	0	0	
2	2022330050065	H. MOHAMAD ALY SHOBAT	16	88	88	88	89.2	A
3	2022330050088	IMAM MUJAHIDIN FAHMID	16	0	0	0	0	
4	2022330050090	ALI JAMIL HARAHAHAP	16	84	84	86	86.4	A
5	2022330050098	RICKY PRAMOEDYA HERMAWAN	16	86	86	86	87.4	A

Wakil Dekan I

(NUR LIAN, S.H., M.H., M.Kn)

Mengetahui,
Ka.Biro Administrasi Akademik
Universitas Jayabaya

(ZULKIFLI, SH.,MH)

Jakarta, 15 Agustus 2024
Dosen Penguji,

(HARWITA SARI, SH, MA (in law))